



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2010-2011**

JUMAT, 22 JULI 2011



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2010-2011

JUMAT, 22 JULI 2011

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati Para Wakil Ketua,
Yang kami hormati Para Anggota Dewan,
Hadirin yang berbahagia,
Sidang Dewan Yang Terhormat,

Hari ini, kita akan mengakhiri Masa Sidang IV yang telah dimulai sejak 9 Mei 2011. Hari ini juga merupakan penutupan satu Tahun Sidang 2010-2011. Oleh karenanya, selain melaporkan Masa Sidang IV, Pimpinan Dewan juga akan menggambarkan sekilas mengenai kegiatan Dewan selama satu tahun sidang DPR, sejak 16 Agustus 2010 sampai dengan hari ini untuk memenuhi ketentuan Tata Tertib DPR-RI Pasal 218 Ayat 3.

Khusus untuk Masa Sidang IV ini, kegiatan Dewan lebih diwarnai dengan rapat-rapat Komisi Dewan, Badan Legislasi, dan Panitia Khusus yang membahas berbagai RUU yang telah ditetapkan menjadi prioritas untuk tahun 2011. Sesuai dengan siklus pembahasan APBN, DPR juga menyelesaikan RUU berkaitan dengan APBN.

Untuk fungsi legislasi, dalam masa sidang ini, Dewan telah menyelesaikan 7 (tujuh) RUU menjadi UU. Satu diantaranya adalah RUU kumulatif terbuka, yaitu RUU tentang Perubahan UU No. 10 tahun 2010 tentang APBN TA 2011. RUU-RUU yang diselesaikan pada masa sidang ini antara lain, RUU tentang Perubahan Atas UU No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, RUU tentang Perubahan Atas UU No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, RUU tentang Perubahan Atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan RUU tentang Penanganan Fakir Miskin, RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ada beberapa RUU yang telah memasuki pembicaraan tingkat I, memerlukan perpanjangan waktu untuk diselesaikan pada Masa Sidang berikutnya, yaitu RUU tentang perubahan UU tentang Penyelenggara Pemilu, RUU tentang Rumah Susun, RUU tentang Perubahan UU tentang Komisi

Yudisial, RUU tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial dan RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan demikian, untuk satu tahun sidang, yaitu sejak 16 Agustus 2010 sampai dengan akhir masa sidang IV ini, telah dapat diselesaikan 17 RUU dan 3 RUU kumulatif terbuka, berkaitan dengan APBN dan Pengesahan Konvensi.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam masa sidang ini ada 7 (tujuh) RUU telah dihasilkan oleh Dewan, kendati demikian, Pimpinan merasa bahwa pelaksanaan fungsi legislasi masih harus tetap didorong, karena belum menunjukkan hasil optimal. Pimpinan menyadari, banyak kendala yang menjadi penyebab terhambatnya pembahasan berbagai RUU, diantaranya ada beberapa substansi pokok pada beberapa RUU yang pembahasannya sangat alot dan memakan waktu, karena sulitnya dicapai kesepakatan antara Pemerintah dan DPR. Kendala lainnya adalah terbatasnya waktu untuk bidang legislasi karena Komisi/Baleg harus melakukan RDP/RDPU dan Kunjungan Kerja ke daerah untuk mendapatkan masukan dan sosialisasi terhadap draft RUU. Pembahasan RUU juga sering berlarut-larut, namun bukan pada substansi, melainkan pada sisi redaksional. Masih diperlukan penyamaan visi mengenai mekanisme pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi untuk mengurangi perbedaan pemahaman antara pengusul (Komisi) dengan Baleg.

Visi tersebut juga diperlukan untuk memperoleh satu pemahaman yang sama mengenai suatu perundang-undangan yang dibahas, yang tidak selalu bertumpu pada penyelesaian politik.

Tersendatnya penyelesaian RUU, mendorong Pimpinan Dewan untuk berupaya melakukan serangkaian langkah dalam mengefektifkan penyelesaian RUU melalui rapat-rapat konsultasi dengan fraksi, dengan berbagai Alat Kelengkapan Dewan, dan bahkan dengan Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka mencari titik temu, seperti halnya dalam penyelesaian RUU tentang BPJS dan OJK. Dalam konsultasi dengan presiden juga disepakati bahwa kedua lembaga perlu memperkuat lembaga masing-masing dengan menunjuk wakil yang akan menjadi **vocal point**.

Dari 7 (tujuh) RUU yang dihasilkan masa sidang ini, *Alhamdulillah*, 1 (satu) RUU yang sangat penting telah tuntas, yaitu RUU tentang Penanganan Fakir Miskin, yang merupakan inisiatif DPR. Sebagaimana kita ketahui, UUD 1945 Pasal 34 ayat 1, mewajibkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Ketentuan ini secara langsung mengharuskan negara memainkan peranan penting dalam memelihara fakir miskin dan anak terlantar, serta mengembangkan sistem Jaminan Sosial Nasional. Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin diperlukan juga peran masyarakat, baik perseorangan, keluarga, ormas, organisasi keagamaan, LSM, organisasi profesi, pelaku usaha dan sebagainya. Penanganan fakir miskin harus berasaskan kemanusiaan, keadilan sosial, non-diskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan dan pemberdayaan.

Dewan menunggu Pemerintah dan para pemangku kepentingan, untuk melakukan tindak lanjut atas pelaksanaan UU ini.

Dalam masa sidang ini, Dewan telah menyelesaikan penyusunan RUU usul inisiatif tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat. Kedua RUU ini akan segera disampaikan kepada Presiden untuk penunjukan menteri yang akan membahasnya bersama DPR.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam satu Tahun Sidang 2010-2011, sebagaimana tahun sidang sebelumnya, pelaksanaan fungsi anggaran telah berjalan sesuai prosedur dan mekanisme APBN. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi anggaran telah dilakukan dengan tepat waktu. Dalam Masa Sidang ini, agenda Pembicaraan Pendahuluan mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam rangka penyusunan RAPBN 2012 telah selesai dilaksanakan, dan telah dilaporkan hasilnya oleh ketua Badan Anggaran dalam Rapat Paripurna DPR.

Badan Anggaran telah membentuk empat (4) Panitia Kerja yang secara intensif telah membahas antara lain mengenai asumsi dasar, pendapatan negara, defisit anggaran, pembiayaan; Rencana Kerja Pemerintah (RKP), belanja pemerintah pusat, dan transfer fiskal ke daerah. Dewan dan Pemerintah telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro, yakni target pertumbuhan ekonomi 2012 pada kisaran 6,6% sampai 7,0%; target inflasi 4,0% sampai 5,3%; target produksi (*lifting*) minyak mentah sebesar 950.000 sampai 970.000 barel per hari; patokan harga minyak mentah Indonesia sebesar USD 75 sampai USD 95 per barel; tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan (sebagai pengganti Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan) adalah 5,5% sampai 6,75%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp. 8.600 sampai Rp. 9.100. Defisit anggaran 1,4% sampai 1,9% terhadap proyeksi PDB 2012.

Dalam kaitan penetapan target defisit anggaran RAPBN 2012, Dewan meminta Pemerintah agar berhati-hati. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya kemampuan keuangan negara (*fiscal resources*), keamanan anggaran (*fiscal capacity*), serta kesinambungan anggaran (*fiscal sustainability*). Ketiga aspek ini menjadi dasar dan pertimbangan dalam merumuskan politik kebijakan anggaran dimanapun.

Untuk penyusunan RAPBN 2012, Pemerintah diminta memonitor perkembangan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011. Pemerintah juga diminta, tidak hanya melakukan monitoring, tetapi juga diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN yang sedang berjalan dan sudah berjalan sebagai gambaran untuk pelaksanaan penyusunan tahun anggaran berikutnya. Pemerintah juga harus sinkron dengan program-program Rencana Kerja Pemerintah yang mengambil tema: "Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif, dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat".

Dalam awal bulan ini, Pemerintah telah menyampaikan RUU APBNP 2011. Pembahasan atas RUU APBNP 2011 dilaksanakan dengan prosedur singkat dan diselesaikan pada Masa Persidangan IV, dengan tetap melibatkan Komisi-Komisi Dewan. Dari hasil evaluasi kinerja ekonomi tahun 2010, serta melihat perkembangan perekonomian dan pembangunan di tahun 2011, Pemerintah memandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap APBN tahun 2011. Selain itu, perubahan APBN 2011 juga dilakukan dalam rangka mengakomodir tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam UU APBN 2011.

Pada awal bulan ini, Pemerintah juga telah menyampaikan Keterangan Pemerintah mengenai pokok-pokok RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2010. UU No. 27 tahun 2009 mengatur bahwa pembahasan dan penetapan RUU-RUU ini dilakukan dalam waktu paling lama 3 bulan setelah bahan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah oleh BPK-RI disampaikan ke DPR. Pembicaraan tingkat II akan dilakukan pada Masa Persidangan I 2011-2012, sekitar minggu ke-4 bulan Agustus.

Dalam keterangannya, Pemerintah menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia 2010 cukup menggembirakan, antara lain ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang positif, investasi yang meningkat dan nilai tukar yang relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 mencapai 6,1% atau lebih tinggi dari yang ditargetkan dalam APBNP tahun 2010 sebesar 5,8%. Terjaganya stabilitas berbagai indikator makro ekonomi antara lain disebabkan berbagai perkembangan positif yang terjadi pada perekonomian global dan penguatan ekonomi domestik yang ditopang juga oleh berbagai upaya pemerintah sebagai salah satu *internal driver* perekonomian dalam mendorong proyek infrastruktur.

Dewan meminta perhatian Pemerintah untuk sungguh-sungguh menerapkan *good governance* dalam meningkatkan kinerjanya, agar pembangunan dapat berjalan dengan efektif, dilakukan pemantapan koordinasi antar lembaga negara dan antar tingkatan pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah juga perlu memperhatikan banyaknya tantangan ancaman krisis ekonomi dunia yang dipicu oleh krisis utang yang dialami beberapa negara di Eropa. Krisis keuangan ini berpotensi meluas ke negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Perlu dilakukan antisipasi sejak dini, agar Indonesia dapat terhindar dari dampak krisis tersebut.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, selama kurun waktu satu tahun ini, Dewan mengamati dengan seksama berbagai permasalahan yang membutuhkan perhatian serius, terutama berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah pertama yang menuntut perhatian kita semua adalah gejala lunturnya nilai-nilai ideologi Pancasila. Hal ini ditengarai dengan makin memudarnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila di kalangan masyarakat, terutama para generasi muda. Memudarnya ideologi Pancasila itu ditandai dengan makin maraknya aksi-aksi kekerasan di kalangan masyarakat. Kita sering menyaksikan konflik diantara berbagai kelompok masyarakat, kecenderungan pada penyelesaian tanpa mampu menghormati lagi kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Memperhatikan kondisi yang makin memprihatinkan, Dewan mendesak pemerintah agar segera menciptakan harmoni di kalangan masyarakat, bertindak tegas terhadap setiap aksi kekerasan yang berpotensi memecah belah bangsa yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

Empat Pilar dalam Kehidupan Berbangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, harus ditanamkan, dijaga dan dilestarikan kepada seluruh masyarakat, terutama generasi muda penerus bangsa. Pancasila yang menyatukan, merekatkan, membangun, menyemangati, dan meneguhkan bangsa, harus kembali menjadi jatidiri ideologi bangsa dan negara. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan menjadikan Pancasila sebagai salah satu mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan nasional dan melalui kebudayaan rakyat, serta dengan mendorong semua orang untuk menjadi teladan kejujuran bagi semua orang.

Sidang Dewan yang terhormat,

Makin maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di hampir semua lini, baik di birokrasi pemerintahan, lembaga-lembaga negara, termasuk aparat penegak hukum, menjadi keprihatinan kita bersama. Masyarakat sering tidak puas terhadap penanganan berbagai kasus oleh aparat penegak hukum. Di lembaga penegak hukum, yaitu lembaga peradilan, kejaksaan dan kepolisian, yang semula diharapkan dapat menjadi benteng terakhir penegakan hukum, kondisinya juga sama.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan KPK, Dewan telah meminta agar proses penegakan hukum berjalan dengan optimal. Kepada KPK diminta, *pertama*, agar tugas di bidang pencegahan tindak pidana korupsi menjadi prioritas; *kedua*, menangani secara tuntas tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian masyarakat dalam sisa masa jabatan, dan *ketiga*, meningkatkan koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Langkah-langkah penanganan korupsi tidak hanya berfokus pada lembaga penegak hukum, namun juga harus dicari akar masalahnya. Seperti adanya ruang yang lebar bagi penyelenggara negara untuk melakukan korupsi, antara lain: me *mark-up* anggaran, menetapkan spesifikasi barang yang menutup ruang untuk kompetisi, dan standar calon *bidder* yang tidak memberikan ruang untuk kompetisi yang sehat. Sudah menjadi rahasia umum adanya praktek distribusi dana haram antara 10-25% dari nilai anggaran proyek yang melebihi nilai wajar. Dewan meminta Pemerintah untuk memperhatikan ketiga hal tersebut dengan membuat suatu standar perhitungan yang wajar dalam menetapkan nilai anggaran, dan membuka ruang agar kompetisi bisa berjalan dengan sehat.

Dalam Masa Sidang ini, Komisi II Dewan telah membentuk Panitia Kerja Mafia Pemilu. Pembentukan Panja ini dimaksudkan untuk dapat mendalami persoalan kinerja KPU dan Bawaslu dalam proses penetapan calon terpilih anggota DPR hasil Pemilu 2009, termasuk untuk mendapat klarifikasi dalam menentukan langkah-langkah dalam hal pengawasan Pemilu. Panja telah bekerja secara intens, yang hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi makin tertibnya pelaksanaan Pemilu 2014.

Sidang Dewan yang terhormat,

Masih lemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap para tenaga kerja kita yang berada di luar negeri, menjadi keprihatinan kita bersama. Kasus hukuman pancung yang telah dialami oleh salah seorang TKI di Arab Saudi, menegaskan bahwa Pemerintah harus memperhatikan para pekerja migran Indonesia dari sisi kemanusiaan, bukan semata-mata dari sisi ekonomi saja. Sudah waktunya bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah strategis bagi keselamatan dan keamanan para pekerja migran Indonesia.

Dewan mengharapkan, jika perlu TKI atau pekerja migran setelah direkrut, diberikan pembekalan pengetahuan mengenai budaya, karakter masyarakat, dan aturan-aturan hukum negara tujuan. Hal ini sangat penting, terutama bagi mereka yang baru pertama kali bekerja di luar negeri. Pembekalan ini sekaligus merupakan pembenahan dalam proses pemberangkatan calon TKI. KBRI dimana TKI berada, untuk bekerja lebih keras, melakukan komunikasi dengan para TKI. Komunikasi jangan hanya dilakukan ketika ada masalah.

Pembebasan Darsem Binti Dawud Tawar dari hukuman pancung merupakan langkah positif, meskipun harus membayar diat yang jumlahnya cukup besar. Namun, pemerintah harus tetap memperhatikan bahwa masih banyak TKI kita yang terancam hukuman mati, tidak hanya di Arab Saudi tetapi juga di negara-negara lain, yang harus diperjuangkan dan dilindungi haknya sebagai warga negara Indonesia.

Terkait dengan keselamatan dan perlindungan TKI di luar negeri, DPR-RI telah membentuk Tim Khusus Penanganan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi. Atas temuan Tim khusus, DPR-Ri telah merekomendasi kepada Pemerintah antara lain: *Pertama*, menghentikan sementara (moratorium) pengiriman TKI ke seluruh negara di wilayah Timur Tengah. *Kedua*, moratorium diakhiri setelah Pemerintah melakukan pembenahan kelembagaan terutama di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BNP2TKI. *Ketiga*, membentuk Gugus Tugas (*Task Force*) dengan penugasan khusus menangani 303 orang TKI yang saat ini terancam hukuman mati terutama di Arab Saudi dan Malaysia.

Kita bersyukur, Presiden telah mengeluarkan Kepres No. 17 tahun 2011 tentang Satuan Tugas penanganan Kasus warganegara Indonesia/Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri yang terancam hukuman mati, dengan beberapa tugas pokok dalam rangka melakukan advokasi dan bantuan hukum bagi WNI/TKI diluar negeri yang terancam hukuman mati.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini tidak luput dari perhatian Dewan. UN sebagai salah satu sarana untuk mengukur kualitas pendidikan sudah seharusnya dievaluasi setiap tahun, agar kualitas pendidikan makin meningkat. Dewan bersepakat bahwa, kebijakan UN bukan lagi sebagai satu-satunya penentu kelulusan, karena penilaian kelulusan adalah dengan penggabungan antara nilai ujian dengan nilai rapor.

Namun disayangkan, dalam pelaksanaan UN masih saja terjadi kecurangan dan penyimpangan di sana-sini, baik secara parsial maupun sistemik. Dimensi politik di daerah juga ikut mendorong terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan UN, sehingga prinsip pendidikan yang seharusnya mengedepankan proses transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran menjadi kontradiktif dengan realitas yang terjadi.

Praktek kecurangan yang terus saja terjadi, pada akhirnya membuat hasil UN tidak bisa dijadikan model evaluasi hasil pembelajaran. Untuk itu, merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk berusaha memupuk pendidikan karakter dalam dunia pendidikan di Indonesia, untuk membentuk individu yang berkarakter ideal sebagai bagian dari transformasi pendewasaan peserta didik. Disamping itu, Pemerintah seharusnya melakukan kajian atas hasil UN tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan standar yang diharapkan.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Untuk bidang luar negeri, ada beberapa kegiatan yang menjadi perhatian Pimpinan Dewan karena terkait dengan kepentingan politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 7-8 Mei 2011. Pimpinan Dewan menyambut baik hasil-hasil yang dicapai dalam KTT tersebut terutama yang berkaitan dengan peningkatan kerja sama regional dalam menghadapi ancaman kecukupan pangan dan ketahanan energi. Kedua isu ini sangatlah penting bagi Indonesia karena terkait dengan masalah perubahan iklim yang mengharuskan semua negara di dunia untuk melakukan upaya adaptasi dan mitigasi untuk menghadapi dampak yang ditimbulkannya.

Bidang luar negeri lainnya yang penting untuk kita perhatikan adalah Sidang ke-38 Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Konperensi Islam yang menyepakati dukungan pengakuan terhadap negara Palestina dengan wilayah perbatasan tahun 1967 dan Jerusalem sebagai ibukotanya. Dukungan ini akan dibawa dalam Sidang Majelis Umum PBB bulan September mendatang. Pimpinan Dewan mendesak pemerintah agar senantiasa memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Bangsa Palestina.

Sidang Dewan yang Terhormat,

DPR-RI juga aktif melakukan diplomasi parlemen dalam upaya meningkatkan hubungan bersahabat dan saling pengertian dengan negara-negara lain baik di tingkat regional maupun internasional. Berbagai delegasi, telah hadir dalam forum-forum pertemuan regional maupun internasional, diantaranya menghadiri *G-20 Seoul Speakers Consultation* yang berlangsung tanggal 17-21 Mei 2011 di Seoul, Korea Selatan.

Pertemuan-pertemuan keparlemenan di tingkat regional lainnya, antara lain Pertemuan ke-8 *AIPA Fact Finding Committee (AIFOCOM)* di Phnom Penh Kamboja, Pertemuan ke-3 *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus* di Manila Filipina, Sidang Umum ke-15 *Asia-Pacific*

Parliamentarian's Conference on Environment and Development (APPCED) di Kuala Lumpur Malaysia, dan Sidang *Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Political Affairs* di Seoul Korea Selatan.

Disamping itu, Ketua DPR-RI dalam kapasitasnya sebagai Ketua Working Group telah membuka Sidang *The Working Group of Asia Pasific of The IPU* pada 14 Juli 2011. Dalam kata sambutannya, telah disampaikan tentang perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Regional Asia Pasific. Perkembangan yang terjadi di Asia Pasifik telah menarik perhatian dan memerlukan penyelesaian bersama. Sebagai Anggota Parlemen Kelompok Asia Pasifik, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan kontribusi nyata bagi penyelesaian permasalahan yang terjadi di Regional Asia Pasific. Sidang satu hari APG telah menghasilkan berbagai rekomendasi untuk kepentingan Asia-Pasific dalam ikut mewarnai Strategic Plan IPU.

Pada hari yang sama, Ketua Parlemen Australia yang sedang mengikuti Sidang *The Working Group of Asia Pasific of The IPU*, telah mengadakan pertemuan dengan Ketua DPR-RI didampingi Pimpinan BKSAP dan Komisi I. Pembicaraan dalam pertemuan berkaitan dengan kerjasama antar parlemen dan hubungan bilateral kedua negara. Parlemen Australia berkepentingan untuk dapat melakukan kerjasama yang erat dengan Parlemen Indonesia mengingat intensitas hubungan yang terjadi sebagai negara yang bertetangga dekat.

Pada minggu pertama bulan Juli, DPR-RI telah mengirimkan Delegasi Muhibah ke Russia dipimpin oleh Ketua DPR-RI. Serangkaian kegiatan telah dilakukan, termasuk melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Rusia (Duma). Dalam pertemuan ini, dibicarakan perkembangan hubungan bilateral kedua negara sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sementara, Ketua Dewan Federasi Rusia memandang bahwa Indonesia adalah negara penting di kawasan, dengan banyaknya peranan Indonesia di wilayah Asia Tenggara. Indonesia dipandang sebagai negara berpenduduk muslim, dengan Islam moderat, dan Rusia ingin banyak belajar dari Indonesia.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Agustus yang akan datang, kita akan memasuki tahun ketiga keberadaan kita sebagai anggota Dewan. DPR hasil Pemilu 2009 adalah DPR hasil amandemen UUD 1945. DPR saat ini menjadi lembaga yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, tetapi belum diikuti oleh penguatan suprastruktur yang menunjang kinerja DPR. Tiga fungsi DPR, yaitu fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi, dinilai oleh masyarakat belum optimal dilaksanakan. Kinerja DPR menjadi sorotan tajam, terutama dalam pelaksanaan fungsi legislasi, oleh karena itu kelembagaan DPR sebagai pilar demokrasi harus diperkuat, baik oleh anggota DPR berikut alat kelengkapannya maupun lembaga pendukung, yaitu Sekretariat Jenderal.

Survei yang dilakukan oleh salah satu media nasional, yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik kepada DPR pada awal keanggotaan hanya 24-25%, harus kita jawab dengan berbagai upaya. Kami selaku pimpinan Dewan, sangat concern bahwa penguatan kelembagaan ini menjadi fokus

utama, oleh karena itu DPR telah menetapkan Renstra DPR-RI 2010-2014. Renstra DPR yang telah ditetapkan telah disosialisasikan kepada masyarakat, baik melalui perguruan tinggi negeri, swasta di berbagai daerah di Indonesia dan Forum Rektor. Catatan penting dari sosialisasi adalah, bahwa semua pihak menghendaki agar Renstra DPR dapat menjadi pendorong bagi optimalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi DPR melalui program kegiatan yang sistematis, terarah dan terukur. Upaya perluasan jejaring kemitraan dengan perguruan tinggi dan civitas akademika dalam memberikan masukan substansi ilmiah terhadap tugas dan fungsi Dewan, perlu terus dikembangkan.

Dalam kaitan ini, saya juga sangat concern terhadap penguatan kelembagaan sistem pendukung yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal. Pimpinan Dewan memberikan apresiasi kepada jajaran Sekretariat Jenderal, dipimpin Sekretaris Jenderal, yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal DPR-RI tahun 2010. Opini WTP ini merupakan prestasi kesekjenan terhadap opini serupa atas laporan keuangan tahun 2009. Kita mengharapkan, capaian ini dapat dipertahankan untuk tahun-tahun mendatang. Opini ini bukan merupakan tujuan akhir, namun sasaran antara menuju efektifitas, efisiensi, dan tertib administrasi pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan untuk mencapai tata pemerintahan yang baik, *good governance*.

Demikianlah pokok-pokok kegiatan yang telah dilakukan Dewan dalam masa Sidang IV ini serta evaluasi permasalahan yang menjadi perhatian Dewan selama satu tahun terakhir. Pimpinan Dewan mengucapkan selamat bertugas kepada para anggota Dewan, yang dalam masa reses ini akan mengunjungi hampir sebagian besar provinsi di Indonesia, dan mengunjungi masing-masing Dapil untuk menemui dan menerima aspirasi dari konstituen.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadhan. Dewan ingin memastikan bahwa selama Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri, ketersediaan bahan makanan pokok mencukupi dengan harga yang terjangkau. Ijinkanlah pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat menjalankan Ibadah Puasa kepada segenap anggota Dewan dan bangsa Indonesia yang menjalankannya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah SWT.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 22 Juli 2011

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

DR. H. MARZUKI ALIE

LAMPIRAN PIDATO PENUTUPAN MASA SIDANG IV 2010-2011**RUU YANG TELAH DISAHKAN SELAMA TAHUN SIDANG 2010-2011**

No	Nama RUU	Inisiatif	Ditangani Oleh	Keputusan Rapur	Menjadi UU Nomor
1.	RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Pemerintah	Pansus	Rapur 5 Oktober 2010	8 Tahun 2010 22-10-2010
2.	RUU tentang Gerakan Pramuka	DPR	Komisi X	Rapur 26 Oktober 2010	12 Tahun 2010 24-11-2010
3.	RUU tentang Cagar Budaya	DPR	Komisi X	Rapur 26 Oktober 2010	11 Tahun 2010 24-11-2010
4.	RUU tentang Hortikultura	DPR	Komisi IV	Rapur 26 Oktober 2010	13 Tahun 2010 24-11-2010
5.	RUU tentang Keprotokolan	DPR	Pansus	Rapur 26 Oktober 2010	9 Tahun 2010 19-11-2010
6.	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik	DPR	Komisi II	Rapur 17 Desember 2010	2 Tahun 2011 15-01-2011
7.	RUU tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	DPR	Komisi V	Rapur 17 Desember 2010	1 Tahun 2011 12-01-2011
8.	RUU tentang Transfer Dana	Pemerintah	Pansus	Rapur 22 Februari 2011	3 Tahun 2011 23-03-2011
9.	RUU tentang Informasi Geospasial	Pemerintah	Komisi VII	Rapur 5 April 2011	4 Tahun 2011 21-04-2011
10.	RUU tentang Akuntan Publik	Pemerintah	Komisi XI	Rapur 5 April 2011	5 Tahun 2011 03-05-2011
11.	RUU tentang Keimigrasian	Pemerintah	Komisi III	Rapur 7 April 2011	6 Tahun 2011 05-05-2011
12.	RUU tentang Mata Uang	DPR	Komisi XI	Rapur 31 Mei 2011	7 Tahun 2011 28-06-2011
13.	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	DPR	BALEG	Rapur 21 Juni 2011	
14.	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang	DPR	Komisi VI	Rapur 19 Juli 2011	
15.	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	DPR	Komisi VI	Rapur 19 Juli 2011	
16.	RUU tentang Penanganan Fakir Miskin	DPR	Komisi VIII	Rapur 21 Juli 2011	
17.	RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	DPR	Pansus	Rapur 21 Juli 2011	

RUU KUMULATIF TERBUKA YANG TELAH DISAHKAN SELAMA TAHUN SIDANG 2010-2011

No.	Nama RUU	Inisiatif	Ditangani Oleh	Keputusan Rapur	Menjadi UU Nomor
1.	RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN TA 2009	Pemerintah	Banggar	31 Agustus 2010	7 Tahun 2010 28-09-2010
2.	RUU tentang APBN TA 2011	Pemerintah	Banggar	26 Oktober 2010	10 Tahun 2010 19-11-2010
3.	RUU tentang APBN-Perubahan TA 2011	Pemerintah	Banggar	22 Juli 2011	